

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Rekonsiliasi laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang disusun oleh KKB DI “Wahana Raharja” masih terdapat kesalahan untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya tersebut. Perbedaan yang terdapat pada Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan KKB DI “Wahana Raharja” tahun 2020 terdapat pada pos-pos diantaranya Beban Cuti Besar, Beban Pasal 21, Biaya komunikasi, Beban Tamu Beban Amortisasi, Jasa Giro, Pendapatan Lain-lain, dan Pajak Atas Jasa Giro. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan pendapatan dalam laporan keuangan komersial.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh KKB DI “Wahana Raharja” tahun 2020 belum melakukan rekonsiliasi fiskal, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan terutangnya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Terdapat Pajak Kurang Bayar pada KKB DI “Wahana Raharja” pada tahun 2020, karena terdapat selisih antara Pajak Penghasilan terutang dengan angsuran pajak pasal 25 komersial sehingga masih terdapat besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan.

5.2 Saran

1. Penulis berharap dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang akan datang terutama pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha, KKB DI “Wahana Raharja” dapat disesuaikan dengan pedoman Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Jika KKB DI “Wahana Raharja” dalam penyusunan laporan keuangannya masih berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan, maka harus melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang. Hal ini, dapat dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada koperasi dengan sanksi pajak
2. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang tepat digunakan KKB DI “Wahana Raharja” dalam menentukan besarnya jumlah Pajak Penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis sebaiknya memperhatikan ketersediaan akses data, karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak umum.